

**STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM MENINGKATKAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
BAGI SUKU MONI
DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH**

Yonike Zonggonao

NPP. 30.1512

Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: yonikezonggonao@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Arnold Poli, S.H, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP): The Population and Civil Registration Office in Improving the Issuance of Identity Cards for the Moni Tribe in Paniai Regency, Central Papua Province has not yet reached the desired target. **Purpose:** The purpose of this research is to analyze how the Strategy of the Population and Civil Registration Office in Increasing the Issuance of Identity Cards for the Moni Tribe in Paniai Regency, Central Papua Province, inhibiting factors in carrying out the issuance of Identity Cards (KTP-el), efforts to overcome obstacles in carrying out the issuance of Identity Cards (KTP-el). **Method:** This research uses a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques used interviews, documentation and observation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the Strategy of the Population and Civil Registration Office in Improving the Issuance of Identity Cards for the Moni Tribe in Paniai Regency, Central Papua Province has not yet reached the desired target. As for the inhibiting factors, namely, 1) there are wrong beliefs and views in the Moni tribe population, 2) the Moni tribe population is still largely illiterate and cannot speak Indonesian and also the tools used by service officers for making Identity Cards (KTP-el) are damaged by the community itself, 3) there are still a lack of officers serving the service of issuing Identity Cards (KTP-el), 4) facilities and infrastructure that are still inadequate. Suggestions for the results of the study are that the population and civil registration office must continue to socialize to the community as well as religious leaders and traditional leaders while continuing to try to enter the village to continue to be able to issue Identity Cards (KTP-el) for Moni tribe residents and also increase the number of officers who carry out direct services to the community. **Conclusion:** The issuance of identity cards (KTP-el) for residents of the Moni tribe by the Paniai District Population and Civil Registration Office has not been well implemented due to rejection from a group of armed communities in several villages, coupled with the low human resources of the Moni tribe, inadequate infrastructure so that it is a priority for the Paniai District Population and Civil Registration Office to routinely carry out socialization by approaching religious leaders, traditional leaders, and local village heads.

Keywords: Publishing, Identity Card , Moni Tribe.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni Di Kabupaten Paniai

Provinsi Papua Tengah belum mencapai target yang diinginkan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, faktor penghambat dalam melaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah belum mencapai target yang diinginkan. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, 1) terdapat kepercayaan serta pandangan yang salah dalam penduduk suku Moni, 2) penduduk suku Moni sebagian besar masih buta huruf dan belum bisa berbahasa Indonesia dan juga alat-alat yang digunakan oleh petugas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dirusak oleh masyarakat sendiri, 3) masih kurangnya jumlah petugas yang melayani pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), 4) sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Saran terhadap hasil penelitian yaitu agar dinas kependudukan dan pencatatan sipil tetap harus secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun tokoh agama dan tokoh adat sambil terus berusaha masuk ke kampung untuk tetap dapat melakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) bagi penduduk suku Moni dan juga menambah jumlah petugas yang melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) bagi penduduk suku Moni oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai belum terlaksana dengan baik akibat adanya penolakan dari sekelompok masyarakat bersenjata di beberapa desa, ditambah oleh SDM masyarakat suku Moni yang rendah, sarana prasarana yang belum memadai sehingga menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai untuk rutin melaksanakan sosialisasi dengan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa setempat. **Kata Kunci: Penerbitan, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Suku Moni.**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan serta perlindungan atas status pribadi dan penentuan hukum dari setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting oleh masyarakat Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia masing-masing. Dalam menentukan perlindungan, pengetahuan, status pribadi dan legalitas semua peristiwa internasional dan peristiwa penting oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia masing-masing, penting untuk mengatur jumlah penduduk dalam sistem administrasi.

Saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kasus yang berkaitan dengan masalah Administrasi Kependudukan di berbagai daerah di Indonesia Khususnya daerah-daerah di pedalaman Papua. Dokumen Kependudukan menjadi bagian terpenting dalam susunan sistem negara Indonesia dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk sebanyak 278.752.361 jiwa berdasarkan data Administrasi Kependudukan per-April 2022. Kemudian diketahui bahwa di Provinsi Papua memiliki banyak suku yang diperkirakan sekitar 255, yang masing-masing dari suku ini mempunyai bahasa, budaya serta tradisi yang berbeda-beda. Kabupaten Paniai adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua Tengah. seluas 6.526,25 km² dengan ibu kota di Enarotali dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 122.124 yang didiami oleh 2 (dua) suku besar yaitu suku Mee dan suku Moni dengan bahasa, adat-

istiadat serta budaya yang berbeda.

Berdasarkan surat edaran Wakil Menteri Dalam Negeri, sampai dengan tanggal 27 oktober tahun 2022 pada tabel rekapitulasi capaian perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), menunjukkan bahwa permasalahan utama yang terdapat di kabupaten Paniai adalah masalah perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Kabupaten Paniai menempati posisi terendah ke dua setelah kabupaten Yahukimo di pulau Papua yang menempati posisi terendah dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) serta kurangnya kepemilikan kartu keluarga (KK) yang masih rendah yang ditunjukkan oleh web resmi direktorat kependudukan dan pencatatan sipil <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/home/>. Pemerintah Paniai terus berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mengoptimalkan penerbitan dokumen kependudukan khususnya dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) bagi suku Moni di kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masyarakat suku Moni masih menganggap dokumen kependudukan itu tidak penting, karena kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, juga terdapat kenyataan bahwa faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah karena adanya ideologi dalam masyarakat yang menyangkut pautkan kemajuan teknologi dalam pelayanan publik dengan hal-hal rohani yang berkaitan dengan kiamat dan akhir zaman. Juga terkhusus bagi masyarakat suku Moni yang berada di kecamatan di balik gunung, dengan jarak yang cukup jauh dengan medan jalan serta ketersediaan transportasi yang memprihatinkan dengan tarif yang begitu tinggi, sehingga menghambat masyarakat untuk sampai ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berada di ibukota kabupaten paniai yaitu kota Enarotali faktor yang paling mendasari kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan yang lain adalah karena hampir semua masyarakat yang berada di pedalaman tidak mampu memahami bahasa Indonesia sehingga penyampaian informasi harus menggunakan bahasa kedaerahan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan dan kapasitas kepala suku dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Yang pertama adalah *Kajian Kepuasan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Terhadap Pelayanan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Brebes* oleh Ahmad Fatkul Fikri dan Titisari Haruming Tyas (2019) menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif. Dari penelitian tersebut ditemukannya indeks kepuasan masyarakat melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, maka didapatkan nilai indeks yaitu 70,75 yang menempati posisi interval 62,51-81,25, sehingga kualitas pelayanan di dukcapil brebes dalam kategori baik. Penelitian kedua yakni berjudul *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan E-KTP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan* oleh Dieka Madani Panaceandaru (2022) menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Mengoptimalkan pelayanan berbasis online maupun offline demi menunjang pelayanan e-KTP seperti melakukan promosi dan penyebaran informasi serta sosialisasi tentang pelayanan administrasi kependudukan melalui media online, memanfaatkan lokasi kantor yang berada dekat dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Banjarbaru untuk meningkatkan pelayanan dengan cara pengintegrasian data penduduk ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain yang ada di Kota Banjarbaru, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan terutama dalam pelayanan penerbitan e-KTP, seperti penambahan alat perekaman/biometric di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Penelitian yang ketiga adalah penelitian dengan judul *Kapasitas Kepala Suku Mee Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung* oleh Ayub Nawipa, Ventje Kasenda dan Frans

Singkoh (Jurnal 2020) 'menggunakan metode analisis kualitatif menghasilkan sebuah fakta bahwa kepala suku Mee mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk banyak hal dalam masyarakat adat yaitu menyelesaikan sengketa adat adat istiadat maupun melakukan pengarahan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat yang ada di kampung.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah yang lokasi fokus penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang berbeda dengan Ahmad Fatkul Fikri dan Titisari Haruming Tyas Selain itu juga menggunakan teori dari Ermaya Suradinata, dkk dalam Ermaya S, 2013:18 yang memiliki 5 indikator penting dalam menganalisis strategi untuk menemukan solusi masalah dan membuat keputusan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan, waktu dan kebutuhan pada organisasi pemerintah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Strategi menurut Ermaya Suradinata. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Penulis melakukan wawancara terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai, Subbagian perencanaan dan keuangan, Kepala suku selaku Ketua Komunitas Suku Moni, 4 masyarakat adat yang terdiri dari 3 pemuda laki-laki 1 ibu rumah tangga. Adapun analisisnya menggunakan 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi suku Moni di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah dengan menggunakan teori dari Ermaya dalam Ermaya S (2013:18) Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

3.1. Jumlah Suku Moni Dan Kepemilikan Catatan Administrasi

Penulis melakukan pengumpulan data, pada bulan november 2022 dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten paniai telah mencatat jumlah penduduk suku Moni dan kepemilikan catatan administrasi KTP-el yang dapat dilihat pada (Tabel 1.2) yang menjelaskan bahwa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) oleh suku Moni dari empat kecamatan di kabupaten Paniai belum mencapai target dan harapan pemerintah.

Tabel 1.2
Jumlah Suku Moni Dan Kepemilikan Catatan Administrasi
(2021-2022)

	CATATAN ADMINISTRASI	
--	-----------------------------	--

KECAMATAN	NOVEMBER 2022		BELUM MEREKAM
	WAJIB KTP-EL	SUDAH MEREKAM	
(1)	(2)	(3)	(4)
BIBIDA	2,632	494	2,138
DUMADAMA	2,979	79	2,900
YOUTADI	6,040	221	5,819
DOGOMO	2,179	79	2,100
TOTAL	13,830	873	12,957

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai 2022

Berdasarkan dari tabel 1.2, terlihat bahwa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) oleh suku Moni dari empat kecamatan di kabupaten Paniai belum mencapai target dan harapan pemerintah. Masyarakat suku Moni, mayoritas masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dari 13,830 jiwa suku Moni yang wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) hanya 873 jiwa yang sudah melakukan perekaman sedangkan 12,957 wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) warga suku Moni belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Dari data ini dapat juga diketahui bahwa betapa kurangnya antusiasme serta kesadaran masyarakat suku Moni akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk di kabupaten Paniai juga kurangnya perhatian pemerintah pada bidang Administrasi Kependudukan.

3.2. Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatab Sipil Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Bagi Penduduk Suku Moni

Penulis melakukan wawancara kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil strategi yang digunakan adalah strategi jemput bolah masuk kampung dan melakukan sosialisai kepada seluruh kepala kampung di kabupaten Paniai mengenai pelayanan adminduk khususnya kepemilikan KTP-el bagi penduduk yang sudah berumur 17 tahun ke atas kemudian menjalin kerja sama dengan kepala suku adat dan juga semua tokoh agama untuk melakukan sosialisasi fokus memberikan pandangan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

3.3. Faktor Penghambat Dan Kendala Dalam Meningkatkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el).

Penulis melakukan wawancara kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga kepala suku yang juga sebagai kepala desa bahwa 1. sampai Hari ini pun masih terdapat kepercayaan serta pandangan yang salah dalam masyarakat Suku Moni 2. Masyarakat suku Moni sebagian besar masih buta huruf dan juga belum bisa berbahasa Indonesia karena dalam keseharian selalu berbahasa daerah mereka, sehingga pada saat petugas akan melakukan jemput bola ada yang di usir kembali karena tidak bisa memahami bahasa Indonesia dan juga alatnya durusak oleh oknum masyarakat 3. Jumlah aparaturnya yang melaksanakan layanan penerbitan kartu tanda penduduk belum memadai dalam hal jumlah 4. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, yakni masih belum meratanya jaringan listrik di Kawasan pemukiman Suku Moni sehingga menyulitkan proses perekaman yang membutuhkan tenaga listrik.

3.4 Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Suku Moni

Ada beberapa upaya yang sudah dilaksanakan yaitu 1. Program jemput bola dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai yang dilakukan dengan cara turun lapangan dengan didampingi kepala desa serta tokoh agama 2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil rutin dalam melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada kepala kampung kemudian kepada masyarakat dengan bantuan tokoh agama 3. Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya serta fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan perekaman penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) seperti infrastruktur dan terkait dengan transportasi menuju ke wilayah suku Moni.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Paniai dinilai sudah baik namun pencapaiannya yang belum maksimal karena banyaknya kendala yang ada pada masyarakat maupun kekurangan-kekurangan pada dinas itu sendiri. Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat suku Moni lebih bisa menerima dan memercayai kepala sukunya dari pada orang-orang dari pemerintah seperti camat maupun bupati sekalipun mereka hanya mendengar kepala sukunya sehingga temuan ini memperkuat temuan penelitian dari Ayub Nawipa, Ventje Kasenda dan Frans Singkoh karena masyarakat adat lebih mendengarkan dan juga menerima kepala sukunya dari pada pemerintah.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat utama dalam penerbitan KTP-el adalah karena adanya pemahaman yang salah yang sejak dulu sudah ada dalam masyarakat serta medan jalan dan jarak tempuh yang sangat sulit dan berbahaya bagi masyarakat. Bagi dinas kependudukan sendiri juga hanya satu alat rekam yang tersedia baik itu digunakan untuk jemput bola ataupun di dalam kantor itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan melalui dimensi teori yang penulis gunakan dalam meneliti bahwa strategi yang cocok dan tepat untuk dilakukan adalah menggunakan pendekatan budaya dan juga keagamaan untuk meningkatkan penerbitan KTP-el bagi suku Moni.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya waktu melaksanakan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan utamanya dalam penyelesaian kendala pemahaman yang beredar dalam masyarakat dan jarak tempuh serta medan jalan dari distrik DumaDama, Dogomo dan Distrik Yautadi ke kota Enarotali Kabupaten Paniai.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Bapak Washington Lumban Gaol, M.Si beserta jajarannya serta Kepala Desa sekaligus kepala suku Moni dan pemerintah daerah kabupaten Paniai yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ermaya Suradinat, 2013. Analisis Kepemimpinan: Alqaprint Jatinangor
Ahmad Fatkul Fikri dan Titisari Haruming Tyas (2019) yang berjudul "Kajian Kepuasan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Terhadap Pelayanan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Brebes"

Ayub Nawipa, Ventje Kasenda dan Frans Singkoh (Jurnal 2020) yang berjudul “Kapasitas Kepala Suku Mee Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung”

Dieka Madani Panaceandaru (2022) yang berjudul “Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan E-KTP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan”

